

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Akuntansi**

##### **2.1.1. Definisi Akuntansi**

Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam aktivitas ekonomi dan kondisi pada suatu perusahaan (Warren Reeve Fess, 2005:10). Informasi akuntansi tersebut digunakan oleh para pemakai agar dapat membantu dalam membuat prediksi kinerja dimasa yang akan datang. Berdasarkan informasi tersebut berbagai pihak dapat mengambil keputusan terkait dengan entitas. Pengertian mengenai akuntansi, banyak sumber yang mendefinisikan salah satunya menurut Dwi Martani (2014:2), pengertian akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Menurut berbagai sumber yang ada, kesimpulan dari pengertian akuntansi adalah sebuah seni yang dalam proses mulai dari pencatatan, meringkas, mengklarifikasi, mengolah dan menyajikan data transaksi serta yang berhubungan dengan laporan keuangan.

### 2.1.2. Standar Akuntansi

Menurut Dwi Martani (2012:14), dijelaskan bahwa laporan keuangan untuk tujuan umum dibuat untuk memenuhi kebutuhan sebagai besar pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan beragam dengan memiliki kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, untuk menyusun laporan keuangan ini diperlukan standar akuntansi yang mengatur dan sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan. Standar akuntansi berfungsi memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan sehingga laporan keuangan antar entitas menjadi lebih seragam.

Standar akuntansi mempermudah Bagian Manajemen dalam penyusunan laporan keuangan karena pedoman memberikan ketentuan cara penyusunan laporan keuangan. Standar akuntansi berisikan kerangka konseptual penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari tujuan, komponen laporan, karakteristik, kualitatif dan asumsi dalam penyusunan laporan keuangan, sedangkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) berisikan pedoman untuk penyusunan laporan, pengaturan transaksi, atau kejadian dan komponen tertentu dalam laporan keuangan.

Pengaturan terkait dengan laporan keuangan terdiri dari definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Standar akuntansi yang berlaku di Indonesia terdiri atas empat standar, sering disebut juga sebagai 4 Pilar Standar Akuntansi yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), Standar Akuntansi

Keuangan Syariah (SAK Syariah) dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Masing-masing Standar akuntansi memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Standar Akuntansi Keuangan *International Financial Report Standard* (PSAK) adalah nama lain dari SAK (Standar Akuntansi Keuangan) yang diterapkan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) pada Tahun 2012. Adopsi penuh IFRS bukan berarti Indonesia tidak memiliki Standar sendiri dan menggunakan secara langsung IFRS. Dewan Standar keuangan (DSAK) tetap melakukan proses penerjemahan IFRS kedalam bahasa Indonesia serta melakukan analisis IFRS dapat diterapkan di Indonesia dan sesuai dengan kondisi hukum dan bisnis yang ada. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) digunakan untuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik yang entitas terdaftar atau dalam proses pendaftaran di pasar modal atau entitas fidusia (yang menggunakan dana masyarakat seperti asuransi, perbankan, BUMN, dan dana pensiun). SAK bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan sedangkan penggunaan IFRS sendiri ditentukan karena Indonesia merupakan anggota IFAC (*Internatinal Federation of Accountants*) yang menjadikan IFRS sebagai standar akuntansi mereka.

2. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) digunakan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik

signifikan dalam menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*). Standar ini mengadopsi IFRS untuk *small medium enterprice* (SME). ETAP merupakan hasil penyederhanaan standar akuntansi IFRS yang meliputi tidak adanya laporan laba/rugi komprehensif, penilaian untuk aset tetap, aset tidak berwujud, dan properti investasi setelah tanggal perolehan hanya menggunakan harga perolehan, tidak ada pilihan menggunakan nilai revaluasi atau nilai wajar, serta tidak ada pengakuan liabilitas dan aset pajak tangguhan karena beban pajak diakui sebesar jumlah pajak menurut ketentuan pajak. Jika diterapkan dengan tepat, unit bisnis kecil dan menengah dapat membuat laporan keuangan tanpa harus dibantu oleh pihak lain dan dapat dilakukan audit terhadap laporannya tersebut. Entitas yang menggunakan SAK ETAP dalam laporan auditnya menyebutkan laporan keuangan entitas telah sesuai dengan SAK ETAP. Penggunaan SAK ETAP akan memudahkan entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan untuk menyusun laporan keuangan karena SAK ETAP lebih mudah dan sederhana.

### 3. Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah)

PSAK Syariah merupakan pedoman yang dapat digunakan untuk lembaga-lembaga [kebijakan syariah](#) seperti bank syariah, pegadaian syariah, badan zakat, dan lain sebagainya. Pengembangan standar akuntansi ini dibuat berdasarkan acuan dari fatwa yang dikeluarkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia). SAK Syariah digunakan untuk entitas yang memiliki transaksi syariah atau entitas berbasis syariah. Standar akuntansi syariah terdiri atas

kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan, Standar penyajian laporan keuangan, dan Standar khusus transaksi syariah seperti *mudharaba*, *murabahah*, *salam*, *ijarah*, dan *istishna*. Standar ini merupakan Standar yang dikembangkan oleh dewan Standar akuntansi keuangan syariah (DSAK Syariah).

#### 4. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah Standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah. SAP berbasis akrual ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Peraturan Pemerintah ini sudah berlaku namun instansi pemerintah masih diperkenankan menggunakan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 SAP berbasis kas menuju akrual, sampai dengan tahun anggaran 2014. SAP berbasis kas menuju akrual, menggunakan basis kas untuk penyusunan laporan realisasi anggaran dan menggunakan basis akrual untuk penyusunan neraca. Dalam SAP berbasis akrual, laporan realisasi anggaran tetap menggunakan basis kas karena akan dibandingkan dengan anggaran yang disusun dengan menggunakan basis kas. Laporan operasional yang melaporkan kinerja entitas disusun dengan menggunakan basis akrual. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) telah ditetapkan sebagai peraturan pemerintah yang diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

## 2.2 Penerimaan Kas

### 2.2.1 Definisi Penerimaan Kas

Penerimaan kas (*cash receipt*) adalah semua bagian (*items*) yang mana perusahaan menerima pemasukan kas selama periode keuangan perusahaan tertentu (Ardiyos,2010:734). Komponen didalam penerimaan kas pada umumnya dari penjualan tunai, pembayaran piutang, serta penerimaan kas lainnya. Segala bentuk pemasukan perusahaan merupakan penerimaan kas baik dari penjualan tunai maupun penjualan kredit.

### 2.2.2 Perolehan Penerimaan Kas

Penerimaan kas perusahaan diperoleh dari sumber penjualan tunai dan penjualan kredit. Penjualan tunai adalah penjualan dimana perusahaan menerima kas secara tunai dan melakukan pencatatan menggunakan *cash basis*. *Cash basis* adalah metode pencatatan penerimaan kas dimana saat perusahaan telah menerima kas atau ada bukti fisik kas perusahaan melakukan pencatatan sebagai pendapatan dari penjualan tunai tersebut. Penjualan kredit adalah jenis penjualan dimana perusahaan menerima kas dari pembayaran piutang dari pembeli atau dapat dikatakan dari penjualan kredit (penjualan non-tunai). Metode pencatatan jika perusahaan melakukan penjualan kredit pada umumnya menggunakan metode pencatatan *accrual basis*. *Accrual basis* adalah metode pencatatan perusahaan dimana perusahaan saat penerima pendapatan tanpa ada bukti fisik (kas) yang diterima sudah dicatat oleh perusahaan sebagai pendapatan dengan pencatatan di

samping debit piutang dagang atau usaha dan disisi kredit dicatat pendapatan dari penjualan kredit tersebut (Ardiyos, 2010:736).

### 2.2.3 Perlakuan Penerimaan Kas

Bukti-bukti transaksi keuangan yang telah diidentifikasi selanjutnya dicatat di dalam jurnal akuntansi. Perlakuan jurnal penerimaan kas dimana transaksi-transaksi yang berhubungan dengan pemasukan kas perusahaan dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas. Transaksi-transaksi uang dikategorikan dalam jurnal penerimaan kas antara lain: penerimaan dari pelunasan atau pembayaran piutang rekening air pelanggan dan penerimaan pendapatan lain-lain.

Pencatatan perlakuan awal saat menerima piutang dari pendapatan rekening air pelanggan.

Piutang rekening pelanggan	Xxx
Pendapatan rekening	xxx

Pencatatan perlakuan saat pelunasan dan menjadi kas perusahaan

Kas / Bank	xxx
Piutang rekening pelanggan	xxx

### 2.3 Jenis-Jenis Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

Prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai menurut Mulyadi (2005:163),ada tiga yaitu:

1. Prosedur penerimaan kas dari *over-the-counter sales*
2. Prosedur penerimaan kas dari *cash-on-delivery sales* (COD sales)

### 3. Prosedur penerimaan kas dari *credit card sales*

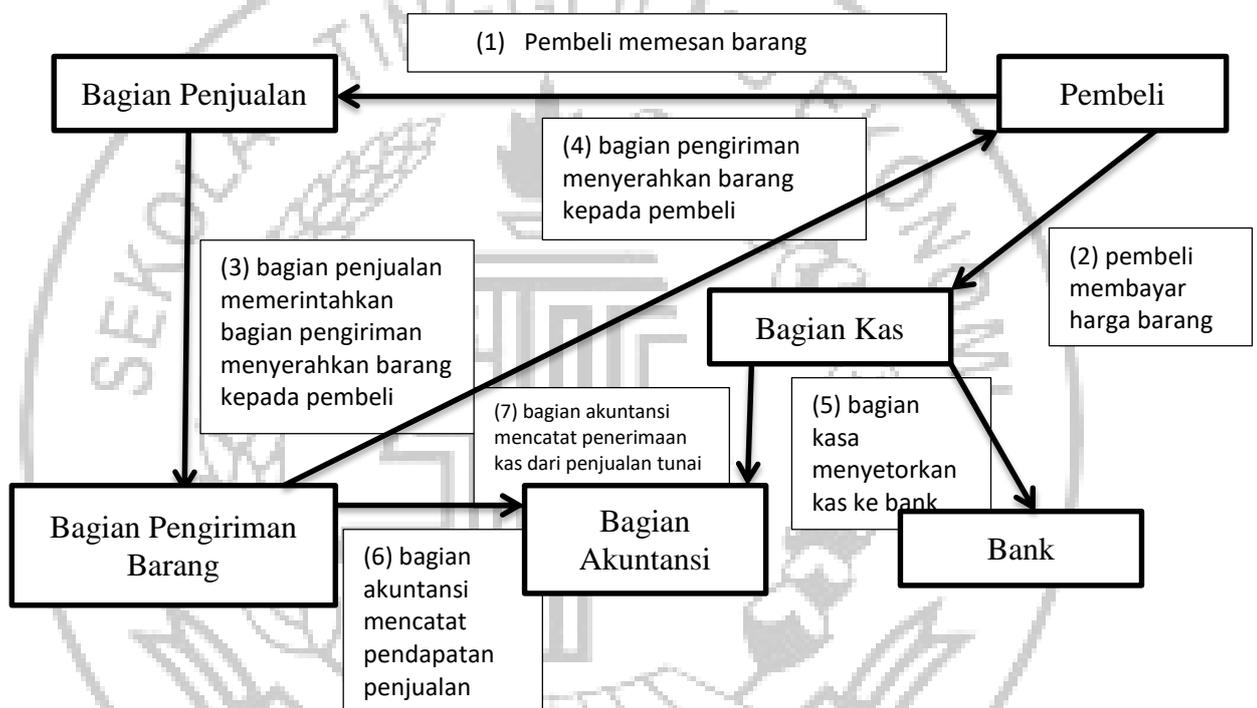
Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai prosedur penerimaan kas dari *over-the-counter sales*. Dalam penjualan tunai dari *over-the-counter sales* yaitu pembeli datang ke perusahaan, melakukan pemilihan barang atau produk yang akan dibeli, melakukan pembayaran ke kasir, dan kemudian pembeli menerima barang yang dibeli.

Prosedur penerimaan kas dari *over-the-counter sales* dilakukan sebagai berikut:

1. Pembeli memesan barang langsung kepada wiraniaga (*sales person*) di bagian penjualan.
2. Bagian Kasa menerima pembayaran dari pembeli berupa uang tunai, cek pribadi (*personal check*), kartu kredit atau kartu debit.
3. Bagian Penjualan memerintahkan Bagian Pengiriman untuk menyerahkan barang kepada pembeli.
4. Bagian Pengiriman menyerahkan barang kepada pihak pembeli.
5. Bagian Kasa menyetorkan kas yang diterima ke bank.
6. Bagian Akuntansi mencatat pendapatan penjualan dalam jurnal penjualan.
7. Bagian Akuntansi mencatat penerimaan kas dari penjualan tunai dalam jurnal penerimaan kas.
8. Jika kas yang diterima berupa cek pribadi, bank penjual akan mengurus *check clearing* tersebut ke bank pembeli.
9. Jika kas yang diterima berupa kartu kredit, maka bank penjual yang merupakan penerbit kartu kredit langsung menambah saldo rekening giro penjual setelah dikurangi dengan *credit card fee* (yang berkisar 2,5%

sampai dengan 4%). Bank penerbit kartu kredit inilah yang secara periodik melakukan penagihan kepada pemegang kartu kredit.

10. Jika kas yang diterima berasal dari kartu debit pembeli maka rekening giro perusahaan penjual langsung secara otomatis bertambah di kredit sebesar nilai penjualan.

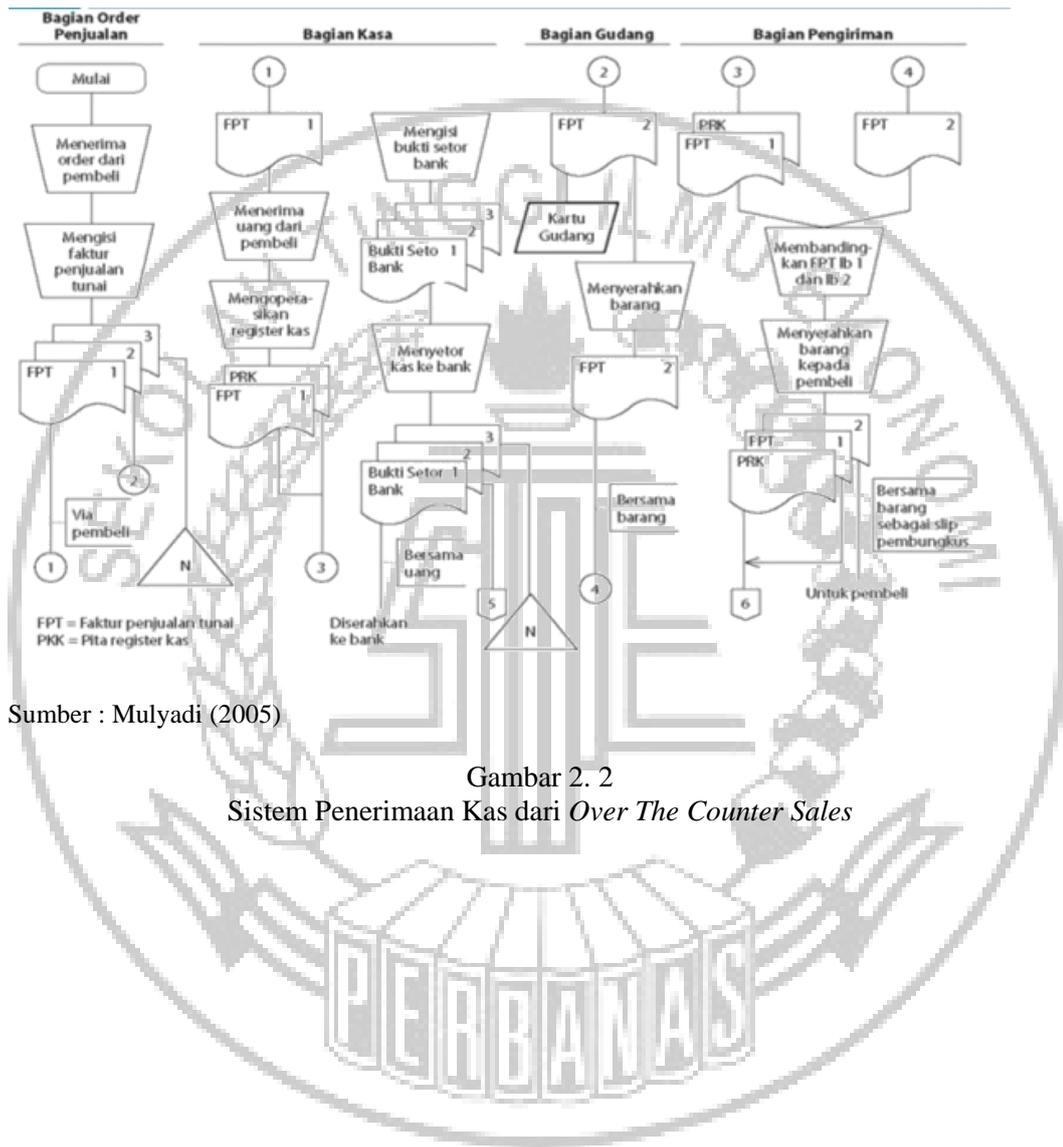


Sumber : Mulyadi (2005)

Gambar 2. 1  
Penerimaan Kas dari Over The Counter Sales

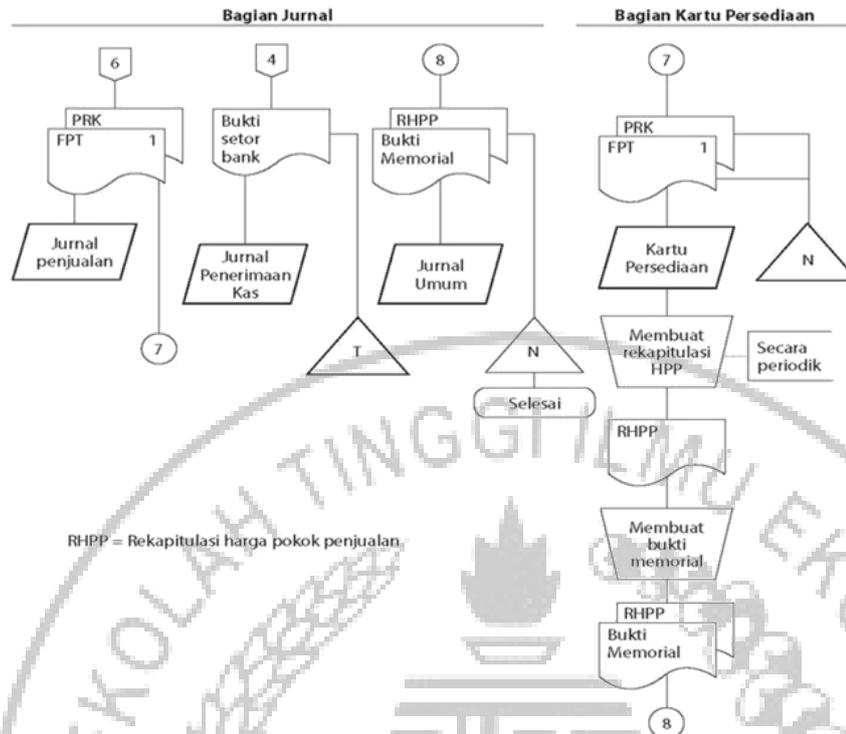
Proses penerimaan kas dapat digambarkan melalui *flowchart* penerimaan kas dari penjualan tunai. *Flowchart* penerimaan kas adalah *flowchart* yang menggambarkan aliran kas yang dibayarkan oleh konsumen ketika melakukan penjualan dan proses pencatatan kas tersebut. Alur proses penerimaan kas mulai dari bagian penjualan ke bagian kasir, setelah itu bagian gudang memberikan barang kepada bagian pengiriman untuk dilakukan pengiriman. Selanjutnya,

setelah selesai semua proses barang kepada pembeli bagian akuntansi akan melakukan pencatatan mulai dari kartu persediaan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal penjualan.



Sumber : Mulyadi (2005)

Gambar 2. 2  
Sistem Penerimaan Kas dari *Over The Counter Sales*



Sumber : Mulyadi (2005)

Gambar 2. 3  
Sistem Penerimaan Kas dari *Over The Counter Sales* (Lanjutan)

#### 2.4 Pencatatan Akuntansi Penerimaan Kas Menurut SAK ETAP 2009

Menurut SAK ETAP(2009:114), pada bab 20 mengenai Pendapatan. Penerimaan kas didapat dari hasil pendapatan perusahaan. Pendapatan yang muncul sebagai akibat dari transaksi atau kejadian berikut:

1. Penjualan barang (baik diproduksi oleh perusahaan untuk tujuan produksi atau dibeli untuk dijual kembali).
2. Pemberian jasa.
3. Kontrak konstruksi.
4. Penggunaan aset perusahaan oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti atau dividen.

Pada bagian ini, hanya penerimaan kas yang didapat dari pendapatan akibat transaksi penjualan.

#### **2.4.1 Pengukuran Pendapatan**

Perusahaan harus mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima. Nilai wajar tersebut tidak termasuk jumlah diskon penjualan dan potongan volume. Entitas harus memasukkan dalam pendapatan manfaat ekonomi yang diterima atau masih harus diterima secara bruto. Entitas harus mengeluarkan dari pendapatan sejumlah nilai yang menjadi bagian pihak ketiga seperti pajak penjualan, pajak atas barang dan jasa, dan pajak pertambahan nilai. Hubungan keagenan, entitas memasukkan dalam pendapatan hanya sebesar jumlah komisi. Jumlah yang diperoleh atas nama pihak prinsipal bukan merupakan pendapatan entitas tersebut.

#### **2.4.2 Identifikasi Transaksi Pendapatan Penjualan Barang**

Menurut SAK ETAP (2009:115), perusahaan umumnya menerapkan kriteria pengakuan pendapatan yang berbeda pada tiap komponen yang dapat diidentifikasi dari suatu transaksi tunggal jika hal ini diperlukan untuk merefleksikan substansi dari transaksi. Misalnya, perusahaan menerapkan kriteria pengakuan kepada tiap komponen yang dapat diidentifikasi dari suatu transaksi tunggal ketika harga jual suatu produk meliputi jumlah yang dapat diidentifikasi atas pemberian jasa lanjutan. Sebaliknya, perusahaan menerapkan kriteria pengakuan pada dua transaksi atau lebih secara bersama-sama ketika

keduanyaterhubungkan sehingga efek komersial tidak dapat dipahami tanpamengacu pada rangkaian transaksi secara keseluruhan. Misalnya, perusahaan menerapkan kriteria pengakuan pada duatransaksi atau lebih ketika perusahaan tersebut menjual barang dan pada saat yang sama membuat perjanjian yang terpisah untuk pembelian kembali barang pada periode selanjutnya, maka hal tersebut meniadakan efek substantif dari transaksi. Perusahaan harus mengakui pendapatan dari suatu penjualan barang jika semua kondisi berikut terpenuhi:

1. Perusahaan telah mengalihkan risiko dan manfaat yang signifikan dari kepemilikan barang kepada pembeli.
2. Perusahaan tidak mempertahankan atau meneruskan baik keterlibatan manajerial sampai kepada tingkat dimana biasanya diasosiasikan dengan kepemilikan maupun kontrol efektif atas barang yang terjual.
3. Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal.
4. Ada kemungkinan besar manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir masuk ke dalam perusahaan.
5. Biaya yang telah atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi dapat diukur secara andal.

### **2.4.3 Pengungkapan**

Menurut SAK ETAP (2009:122), perusahaan harus mengungkapkan:

1. Kebijakan akuntansi yang diterapkan sebagai dasar pengakuan pendapatan, termasuk metode yang diterapkan untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi yang melibatkan penyediaan jasa.

2. Jumlah setiap kategori pendapatan yang diakui selama periode, termasuk pendapatan yang timbul dari:
  1. Penjualan barang.
  2. Penyediaan jasa.
  3. Bunga.
  4. Royalti.
  5. Dividen.
  6. Jenis pendapatan signifikan lainnya.

## **2.5 Pedoman Kebijakan Akuntansi PERPAMSI PDAM Surya Sembada Kota Surabaya**

### **2.5.1 Definisi Pedoman Kebijakan Akuntansi PERPAMSI**

Berdasarkan web PDAM maupun web BUMN yaitu dalam buku pedoman kebijakan akuntansi menurut Albertus (2015:34), yang terdapat pedoman kebijakan akuntansi PERPAMSI menjelaskan bahwa PERPAMSI adalah pedoman perusahaan air minum seluruh Indonesia. Pedoman ini merupakan adopsi dari SAK ETAP 2009 dan memberikan gambaran umum, penjelasan detail, dan prosedur yang harus dilakukan dalam membuat laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK ETAP, digunakan oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Entitas seperti ini memiliki dua karakteristik yaitu tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan hanya

untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal, tetapi penting bagi keperluan internal, terutama bagi Direksi dan Badan Pengawas. Pedoman kebijakan akuntansi PERPAMSI ini menyajikan penjelasan rinci tentang akuntansi PDAM antara lain, tentang siklus akuntansi yang merupakan tahapan kegiatan yang harus diikuti dalam melaksanakan proses akuntansi. Siklus akuntansi PDAM dilukiskan dengan sebuah skema dengan penjelasan yang rinci sehingga lebih mudah dimengerti, serta dijelaskan tentang kode akun atau perkiraan atau rekening yang dimaksudkan sebagai pedoman untuk pencatatan transaksi-transaksi keuangan agar didapat suatu pengelompokan yang tertib dan seragam di seluruh PDAM. Pengelompokan kode akun atau perkiraan atau rekening dibuat sedemikian rupa untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. SAK ETAP juga menjelaskan tentang media pencatatan transaksi untuk PDAM, yang terdiri atas buku harian atau jurnal, buku besar dan buku pembantu tetapi terdapat rincian satu persatu untuk memudahkan para pegawai keuangan mengikutinya. Sebagaimana Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu entitas tanpa akuntabilitas publik yang diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan Pedoman Akuntansi Keuangan. Namun kenyataannya, tidak mudah bagi PDAM untuk menerapkan Standar Akuntansi Keuangan tersebut. Sampai saat ini, terdapat sekitar 10 persen PDAM di Indonesia yang belum dapat menyusun laporan keuangan. Dengan adanya pedoman ini diharapkan dapat menyusun laporan keuangan sesuai Standar akuntansi yang berlaku.

### 2.5.2 Pencatatan Pedoman Kebijakan Akuntansi PERPAMSI

Pencatatan berdasarkan pedoman kebijakan akuntansi PERPAMSI kurang lebih sama dengan pencatatan pada pedoman SAK ETAP 2009. Pencatatan khususnya pada penelitian ini pada penerimaan kas yang diterima oleh perusahaan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya terdiri dari pendapatan usaha dan non usaha. Pendapatan usaha meliputi pendapatan penjualan air, baik diproduksi sendiri oleh PDAM atau dibeli untuk dijual kembali dan pendapatan non air seperti sambungan baru, pemeriksaan laboratorium, penggantian kerusakan, penyambungan kembali. Sedangkan pendapatan non operasional meliputi pendapatan bunga deposito, sewa, royalti, dividen.

Selanjutnya secara rinci sesuai dengan penelitian ini, pendapatan yang diperoleh dari penjualan tunai. Pengakuan pendapatan penjualan tunai diakui dengan terbitnya Daftar Rekening Ditagih (DRD) Air. Pengukuran pendapatan penjualan tunai diukur berdasarkan nilai tagihan pemakaian air yang diterbitkan dalam DRD Air setiap bulan atau nilai pembayaran uang untuk transaksi penjualan air secara tunai. Pengungkapan untuk pendapatan penjualan tunai sesuai kebijakan akuntansi yang diterapkan sebagai dasar pengakuan pendapatan dan sesuai jumlah setiap kategori pendapatan yang diakui selama periode.